

Sambutan Gubernur Bank Indonesia

Launching Gerbang Pembayaran Nasional

Jakarta, 4 Desember 2017

Yang Kami Hormati:

- ***Menteri Koordinator Bidang Perekonomian***
- ***Menteri BUMN***
- ***Menteri Sosial***
- ***Menteri Keuangan***
- ***Menteri Komunikasi dan Informatika***
- ***Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan***
- ***Para Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia***
- ***Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia***
- ***Para Direktur Utama Perbankan***
- ***Para Direktur Utama Penyelenggara Switching***
- ***Bapak/Ibu, Hadirin Undangan Sekalian Yang Berbahagia***

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

1. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul, dalam keadaan sehat, hadir bersama mengikuti Launching Gerbang Pembayaran Nasional.
2. Kita semua masyarakat Indonesia tentu menyadari, bahwa setiap aktivitas ekonomi kita sehari-hari, mulai dari membeli bahan makanan, berlangganan jasa telekomunikasi, sampai dengan memenuhi kebutuhan transportasi tidak terlepas dari transaksi menggunakan alat pembayaran, baik tunai maupun non tunai.
3. Apalagi di era digitalisasi saat ini, kami mencermati bagaimana instrumen dan sarana pembayaran ritel elektronik tumbuh kian marak di Indonesia,

guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang semakin cepat, mudah, dan praktis.

4. Sebagai contoh, di tahun 2017, dalam setiap menit terjadi lebih dari 10.000 transaksi ATM, Debit, dan Kartu Kredit di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi yang begitu besar dan jangkauan geografis yang begitu luas, sudah semestinya memiliki sistem pembayaran nasional yang aman, lancar, efisien, dan andal.
5. Namun kami mencermati, ditengah pesatnya kebutuhan bertransaksi, masih terdapat fragmentasi, inefisiensi, dan risiko keamanan yang dihadapi konsumen. Fragmentasi muncul karena kecenderungan industri untuk membangun platform sistem pembayaran yang sifatnya eksklusif, yaitu hanya dapat melayani instrumen yang diterbitkannya sendiri.
6. Platform-platform yang ada juga belum saling terhubung atau *interconnected* satu sama lain, sehingga belum mampu menyediakan ekosistem layanan yang dapat saling melayani (interoperabel). Ilustrasi paling sederhana yang sering kita jumpai adalah banyaknya deretan mesin ATM di mall dan berjejeranya mesin EDC di kasir supermarket.
7. Kami juga melihat bahwa kapabilitas penyelenggaraan switching dan pemrosesan transaksi domestik di Indonesia, yang telah ada sejak lebih dari 20 tahun lalu, masih terbatas hanya pada layanan ATM. Sedangkan layanan lainnya, seperti transaksi kartu debit lintas penerbit dan *acquirer (off-us)* dimana kartunya diterbitkan di Indonesia, dipegang oleh orang Indonesia, dan digunakan untuk membeli barang/jasa di Indonesia, hingga saat ini masih harus diproses transaksinya ke luar negeri.
8. Fragmentasi tersebut pada gilirannya melahirkan inefisiensi, yang dapat dilihat dari beberapa hal utama, yaitu:

- 1) **Biaya investasi perluasan infrastruktur dan teknologi menjadi tinggi**, karena industri enggan berbagi layanan, seperti investasi mesin ATM dan EDC yang begitu besar hanya untuk di satu lokasi. Padahal, apabila mesin-mesin tersebut dapat saling interoperabel, terdapat potensi yang begitu besar untuk merelokasinya ke daerah-daerah di penjuru tanah air yang masih mengalami kekurangan. Sehingga akan mampu mendorong perluasan akses dan keuangan inklusif di Indonesia.
- 2) **Masyarakat menjadi perlu untuk memiliki banyak kartu**, karena akseptasi kartu yang masih terbatas. Hal ini dikarenakan kartu tertentu hanya dapat digunakan di mesin terminal pembayaran tertentu, akibat setiap ATM atau EDC tidak dapat menerima semua jenis kartu.
- 3) **Kalaupun diterima, kartu yang digunakan pada terminal ATM / EDC yang berbeda akan dikenakan biaya yang relatif tinggi**, dimana Merchant Discount Rate (MDR) dapat mencapai 2-3% per transaksi. Biaya ini tentu pada akhirnya ikut ditanggung oleh konsumen.

Bapak/Ibu Hadirin Yang Kami Hormati,

9. Memperhatikan kondisi tersebut, Bank Indonesia meyakini kehadiran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menjadi amat penting dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pengembangan GPN merupakan pelaksanaan mandat yang diberikan Undang-Undang kepada Bank Indonesia selaku Otoritas Sistem Pembayaran Nasional untuk mencapai sistem pembayaran nasional yang aman, lancar, dan efisien.
10. Kami begitu berbesar hati, sejak digagas lebih dari 20 tahun yang lalu, yaitu dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Nasional Tahun 1995/1996, pada pagi hari ini akan menjadi suatu momen bersejarah karena GPN akan diluncurkan dan dimulai implementasinya.

11. **Paling tidak terdapat tiga sasaran utama dari implementasi GPN:**

- 1) Menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabel, dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring, dan setelmen secara domestik.
- 2) Meningkatkan perlindungan konsumen, antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi.
- 3) Meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional, guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi, serta resiliensi sistem keuangan.

12. Selain itu, GPN juga dihadirkan sebagai *backbone* untuk memberikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah. Termasuk diantaranya penyaluran bantuan sosial non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif, serta pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik yang telah dimandatkan dalam PERPRES 74 tahun 2017 tentang Roadmap E-Commerce.

Bapak/Ibu Hadirin Yang Kami Hormati,

13. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan GPN yang terdiri dari enam pokok kebijakan, yaitu:

- 1) **Membentuk tiga Penyelenggara GPN**, yaitu Lembaga Standar, Lembaga Switching, dan Lembaga Services.
 - **Lembaga Standar**, bertugas menyusun dan mengelola standar teknologi pembayaran nasional yang ditetapkan Bank Indonesia dan wajib dipatuhi oleh seluruh industri, yaitu untuk ATM/Debit adalah NSICCS, dan untuk Uang Elektronik adalah melalui penerapan SAM Multi Applet. Saat ini Lembaga Standar telah dibentuk dan dijalankan

oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai representasi industri. Untuk selanjutnya, Lembaga Standar akan diarahkan berbentuk badan hukum dengan pengelolaan yang bersifat profesional, kompeten dan mandiri.

- **Lembaga Switching**, bertugas menyelenggarakan pemrosesan data transaksi pembayaran domestik secara aman dan efisien. Pada momen peluncuran GPN ini, kami ingin menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah menetapkan 4 penyelenggara switching domestik sebagai Lembaga Switching GPN, yaitu Jalin Pembayaran Nusantara, Artajasa Pembayaran Elektronik, Rintis Sejahtera, dan Alto Network.
 - **Lembaga Services**, memiliki empat tugas utama, yaitu (1) menjaga keamanan transaksi dengan memastikan enkripsi data transaksi secara *end-to-end*; (2) menyelenggarakan rekonsiliasi-kliring-setelmen secara efisien; (3) menangani perselisihan transaksi d.r. perlindungan konsumen; dan (4) mendorong perluasan akseptasi instrumen non tunai. Lembaga Services dibentuk dan dimiliki bersama oleh Lembaga Switching GPN dan anak usaha dari pelaku industri utama yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BCA yang mencakupi 75% pangsa transaksi pembayaran ritel nasional melalui konsorsium. Pendirian konsorsium akan diawali dengan penandatanganan perjanjian pada pagi hari ini, dan diharapkan akan segera berbadan hukum untuk dapat beroperasi penuh di Juli 2018.
- 2) **Penataan infrastruktur**, yaitu dengan mewajibkan penerbit, *acquirer*, agen, dan *payment gateway* terkoneksi kepada minimal dua Lembaga Switching GPN. Serta diikuti kewajiban interkoneksi diantara Lembaga Switching GPN, sehingga keandalan layanan dapat terjaga.

- 3) **Kewajiban pemrosesan transaksi (*routing*) domestik**, yaitu terhadap instrumen yang diterbitkan di dalam negeri dan ditransaksikan melalui kanal pembayaran dalam negeri, wajib untuk diproses melalui infrastruktur dan sistem yang ada di dalam negeri.
- 4) **Menetapkan skema harga (*pricing policy*) yang wajar**. Untuk tahap awal, dalam PADG GPN telah ditetapkan besaran MDR kartu debit sebesar 1% per transaksi *off-us*, atau lebih rendah dari yang berlaku selama ini dikisaran 2-3%. Penurunan MDR ini berlaku efektif secara nasional pasca peluncuran GPN pagi hari ini. Penetapan skema harga ini kami yakini akan mampu mendorong efisiensi, kompetisi yang sehat, dan inovasi layanan.
- 5) **Menerapkan logo nasional**, guna memperluas akseptasi instrumen pembayaran ritel non tunai yang dapat digunakan di seluruh *merchant* dalam negeri. Mulai tahun 2018, seluruh penerbit wajib menyediakan kartu berlogo nasional dan menjelaskan manfaatnya kepada nasabah.
- 6) **Menetapkan standarisasi fitur layanan**, sehingga mampu menjawab perkembangan kebutuhan transaksi masyarakat. Fitur layanan yang wajib disediakan meliputi pembayaran, transfer, tarik tunai, cek saldo, dan layanan lainnya yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Kedepan, akan dikembangkan juga fitur pembayaran tagihan rutin yang terstandarisasi dan interoperabel, seperti tagihan listrik, air, dan asuransi kesehatan melalui fitur Electronic Billing and Invoicing Presentment and Payment (EBIPP).

14. Dengan serangkaian kebijakan tersebut, dampak positif yang diharapkan:

- 1) **Mendorong *sharing infrastructure***, sehingga utilisasi terminal ATM/EDC dapat meningkat dan yang berlebih dapat direlokasi ke

daerah yang kekurangan. Biaya investasi infrastruktur kemudian dapat dialihkan kembali untuk kegiatan pembiayaan/pinjaman yang pada akhirnya akan memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

- 2) Mengurangi kompleksitas koneksi dari sebelumnya bilateral antar pihak, menjadi ter-sentralisasi kepada GPN.
- 3) Masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun, dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun (*any bank, any instrument, any channel*).
- 4) Efisiensi nasional akan tercipta dari skema harga yang lebih kompetitif.

Bapak/Ibu Hadirin Yang Kami Hormati,

15. Peluncuran GPN pada pagi hari ini adalah buah dari sinergi yang telah dibangun bersama industri sejak lama. Guna memastikan kesiapan dan kelancaran implementasinya, mulai tahun 2016 Bank Indonesia bersama industri secara intensif telah menyelesaikan uji konsep dan melakukan uji coba (*piloting*) di 122 *merchant* besar berskala nasional. Kami bersyukur, hingga saat ini, ke-4 Lembaga Switching GPN telah terkoneksi dengan 60 penerbit dan 14 *acquirer*, dengan tingkat interoperabilitas transaksi debit mencapai 75%.

16. Dengan mempertimbangkan kesiapan dan kemajuan yang telah dicapai, pada rangkaian acara pagi hari ini akan dilakukan 4 pendandatanganan dokumen yang menandai dimulainya operasionalisasi GPN, yaitu:

- Perjanjian Konsorsium untuk meresmikan pendirian Lembaga Services
- Perjanjian Kerjasama interkoneksi ke-4 Lembaga Switching GPN
- Perjanjian Kerjasama interoperabilitas Kartu Debit
- Perjanjian Kerjasama interoperabilitas Uang Elektronik

17. Disamping itu, juga akan diluncurkan logo nasional GPN sebagai simbol identitas sistem pembayaran nasional yang akan menjadi bagian dari transaksi seluruh masyarakat yang semakin aman, andal, dan terpercaya.

Bapak/Ibu Hadirin Yang Kami Hormati,

18. Sebelum mengakhiri sambutan kami, kami ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kementerian, Otoritas Jasa Keuangan, industri, dan asosiasi atas sinergi dan dukungan dalam menyukseskan pengembangan GPN. Kami berharap, sinergi dan dukungan tersebut dapat semakin kuat terjalin, dalam mengawal implementasi guna mewujudkan sasaran utama GPN yang dicita-citakan.

19. Dalam kesempatan ini, kami juga mengundang Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Menteri BUMN, Ibu Menteri Sosial, Ibu Menteri Keuangan, dan Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika untuk berkenan memberikan dukungan dan sambutan, yang kami yakini selaras dalam menumbuhkan optimisme kita semua untuk menyongsong Indonesia yang siap menghadapi era digital, melalui sistem pembayaran nasional yang aman, andal, efisien, dan lancar.

20. Akhirnya, seiring dengan manfaat, kemudahan, dan kenyamanan yang akan dirasakan, kami berharap keseluruhan upaya ini akan mampu mendorong peningkatan transaksi non tunai sebagai katalis dan urat nadi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dan di masa mendatang.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

**Gubernur Bank Indonesia
Agus D.W. Martowardojo**